



Media Title	Investor Daily	
Date	6 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	6	Article Size
Journalist	ean	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

## TOL TRANS-SUMATERA

# BPJT Minta Utama Karya Bentuk 4 Badan Usaha

JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meminta PT Utama Karya segera membentuk empat anak usaha yang mengurus jalan tol trans-Sumatera yang menjadi tugas perseroan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 100/2014. Adapun ruas tol yang akan dibangun adalah tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali mengatakan, keempat anak usaha ini yang akan menyusun rencana bisnis, mencari pengakuan dukungan, membebaskan lahan, dan menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). “Dalam membentuk badan usaha tersebut, Utama Karya bisa menggandeng operator ataupun kontraktor yang bisa menjadi mitra,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Setelah terbentuk, lanjut dia, empat anak usaha Utama Karya ini diminta mendapatkan pengakuan dukungan (*service level agreement/SLA*) dari setiap pemangku kepentingan sebelum dilakukan penandatanganan PPJT. Pengakuan dukungan

itu diperlukan sebagai salah satu modifikasi standar PPJT, menyusul adanya perlakuan khusus kepada Utama Karya berupa dukungan pemerintah.

“Mereka kan sudah dapat penugasan langsung melalui Perpres No 100/2014, sebenarnya itu cukup dan tidak perlu ada PPJT. Namun, karena mereka mendapatkan dukungan pemerintah, seperti adanya Penyerahan Modal Negara dan pinjaman obligasi, maka kami minta SLA tersebut,” ujar dia.

Oleh karena itu, sambung Gani, Utama Karya perlu melakukan *roadshow* ke sejumlah *stakeholder* untuk mendapatkan pengakuan dukungan tersebut, di antaranya ke Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, maupun perusahaan negara lainnya. Dukungan yang dapat diberikan para *stakeholder* antara lain pembebasan lahan oleh pemerintah daerah ataupun dukungan konstruksi dari perusahaan lain.

“Tapi yang paling penting adalah dari Kementerian Keuangan, karena terkait penjaminan dari sisi pembiayaan. Kalau pernyataan dukungan itu tidak ada, maka tidak ada jaminan,”

tegas dia.

Setelah mendapatkan dukungan tersebut, setiap anak usaha Utama Karya tersebut juga diminta melengkapi rencana bisnis (*business plan*) dari tiap ruas tol trans-Sumatera yang dibangun, dan selanjutnya dapat dilakukan penandatanganan PPJT jika disetujui pemerintah.

Di sisi lain, sambung Gani, tiap anak usaha Utama Karya ini bisa juga melakukan proses pembebasan lahan untuk mempercepat pembangunan. Apalagi, dalam Perpres No 71/2012 disebutkan badan usaha bisa membebaskan lahan, sehingga tidak harus mengandalkan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widianoro mengungkapkan, perseroan tengah menyiapkan pembentukan badan usaha jalan tol trans-Sumatera tersebut sebelum menyelenggarakan tender konstruksi dan kemudian mulai pembangunan fisik (konstruksi). “Persiapan awal yang kami lakukan diantaranya, *feasibility study*, pembentukan satuan kerja (satker) proyek, dan persiapan administrasi,” kata dia. (ean)